Pasca RIS (Republik Indonesia Serikat) mengacu pada periode setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950. Pada periode pasca RIS, Indonesia mengalami berbagai perubahan politik dan sosial, yaitu:

1. "Kembalinya NKRI" – Pembubaran negara bagian RIS dan pemulihan pemerintahan Indonesia sebagai negara kesatuan.

2. "Konstitusi Sementara 1950" – Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 sebagai pedoman pemerintahan.

3. "Demokrasi Liberal" – Sistem pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah demokrasi parlementer dengan seringnya pergantian kabinet.

4. "Tantangan Stabilitas" – Banyaknya konflik politik, ketidakstabilan pemerintahan, dan pemberontakan di berbagai daerah.

5. "Munculnya Konsep Demokrasi Terpimpin" – Ketidakstabilan politik pada era pasca RIS berkontribusi pada pergeseran menuju sistem Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno pada akhir 1950-an.

Adapun Pro dan Kontra Pasca RIS, yaitu:

Pro (Keuntungan Pasca RIS)

1. Kembali ke NKRI yang Lebih Kuat dan Bersatu

• Dengan bubarnya RIS, Indonesia tidak lagi terpecah dalam negara bagian yang bisa memperlemah persatuan nasional.

• Mengakhiri upaya Belanda dalam memecah-belah Indonesia melalui strategi "divide et impera."

2. Menghilangkan Pengaruh Belanda yang Masih Ada

• RIS adalah hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), yang masih memberikan pengaruh besar bagi Belanda di Indonesia.

• Setelah kembali ke NKRI, Indonesia bisa lebih bebas menentukan arah politik dan ekonominya tanpa campur tangan kolonial.

3.Adanya Landasan Hukum Baru dengan UUD Sementara 1950

• Indonesia mengadopsi UUDS 1950, yang memberikan dasar bagi sistem parlementer dan demokrasi liberal.

• Hal ini memungkinkan pembentukan partai politik yang lebih aktif dalam pemerintahan.

4. Mempermudah Pengelolaan Administrasi Negara

• Sebelum kembali ke NKRI, masing-masing negara bagian dalam RIS memiliki sistem administrasi sendiri.

• Dengan negara kesatuan, pemerintahan menjadi lebih terpusat dan efisien dalam mengambil kebijakan nasional.

5. Memperkuat Nasionalisme dan Identitas Bangsa

• Pembubaran RIS menunjukkan kesadaran nasional yang tinggi di berbagai daerah untuk bersatu di bawah NKRI.

• Hal ini membantu memperkuat semangat kebangsaan dan perjuangan bersama dalam membangun Indonesia.

Kontra (Tantangan Pasca RIS):

1.Ketidakstabilan Politik dan Seringnya Pergantian Kabinet

• Sistem demokrasi parlementer yang diterapkan setelah RIS membuat pemerintahan sering mengalami pergantian kabinet karena lemahnya dukungan politik.

2. Pemberontakan di Berbagai Daerah

• Kembalinya NKRI tidak serta-merta menyelesaikan semua masalah di daerah.

• Beberapa kelompok yang sebelumnya diuntungkan dalam sistem federal menolak integrasi, seperti:

- Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung (1950).

- Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang menolak kembali ke NKRI.

3. Ekonomi yang Masih Lemah dan Ketergantungan pada Belanda

• Sebagai bagian dari KMB, Indonesia masih harus membayar utang Belanda yang sangat besar, sehingga membebani ekonomi negara

4. Konflik Ideologi dan Perbedaan Visi Politik

• Setelah RIS, terjadi perdebatan besar antara kelompok nasionalis, Islamis, dan komunis tentang arah politik Indonesia.

• Konflik ideologi ini menyebabkan ketegangan yang berujung pada peristiwa seperti pemberontakan PRRI/Permesta dan Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun-tahun berikutnya.

5. Munculnya Sentralisasi yang Berlebihan

• Meskipun negara kesatuan dianggap solusi terbaik, dalam praktiknya, banyak daerah merasa kurang diperhatikan karena keputusan banyak diambil di pusat (Jakarta)

Analisis 5W + 1H dari periode Pasca RIS (Republik Indonesia Serikat):

1. What (Apa yang terjadi?)

- Pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- Perubahan sistem pemerintahan dari sistem federal ke sistem negara kesatuan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

2. Who (Siapa yang terlibat?)

- Pemerintah Indonesia, terutama Presiden Soekarno, Perdana Menteri Mohammad Hatta, dan tokoh nasional lainnya.

- Negara bagian dalam RIS, seperti Negara Pasundan, Negara Sumatra Timur, dan Negara Indonesia Timur.

- Kelompok pemberontak, seperti APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), Republik Maluku Selatan (RMS), dan DI/TII.

3. When (Kapan terjadi?)

• Tanggal kunci:

- 27 Desember 1949: RIS dibentuk setelah Konferensi Meja Bundar (KMB).

-17 Agustus 1950: RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke NKRI.

-1950-1959: Periode Demokrasi Liberal, yang diwarnai ketidakstabilan politik dan pemberontakan di berbagai daerah.

4. Where (Di mana terjadi?)

- Jakarta, sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan yang memimpin proses transisi dari RIS ke NKRI.

- Bekas negara bagian RIS, seperti Negara Pasundan (Jawa Barat), Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur, yang akhirnya melebur ke dalam NKRI.

• Wilayah konflik, seperti:

- Bandung, tempat pemberontakan APRA (1950).

- Maluku, pusat pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).

- Jawa Barat, Sulawesi, dan Aceh, yang menjadi basis gerakan DI/TII.

5. Why (Mengapa terjadi?)

- RIS dianggap sebagai warisan Belanda dan bentuk federalisme yang melemahkan Indonesia.

- Sebagian besar rakyat dan pemimpin daerah menolak RIS karena ingin kembali ke negara kesatuan.

6. How (Bagaimana prosesnya?)

- Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang mengubah sistem pemerintahan dari federal menjadi parlementer.

- Pemerintah menghadapi pemberontakan dari kelompok yang tidak setuju, seperti APRA, RMS, dan DI/TII.

- Meskipun kembali menjadi negara kesatuan, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi, yang kemudian mendorong peralihan ke sistem Demokrasi Terpimpin pada 1959.